

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Demokrasi telah membukakan ruang-ruang demokratis yang diharapkan mampu menciptakan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak dominan. Peneliti mengartikan ruang demokratis adalah ruang-ruang yang dibuka dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Hal yang dapat dihadirkan dalam ruang demokratis adalah ruang publik. Dimana dalam ruang publik ini kepentingan sosial, kepentingan bersama dapat tersuarakan. Disinilah peran negara, mereka wajib untuk menyediakan ruang-ruang tersebut.

Dalam hal ini ruang demokrasi sangat menjunjung tinggi hak individu dalam menyampaikan pendapat. Selain ruang publik untuk mengisi ruang demokrasi, pemerintahan yang egaliter dan dapat mendistribusikan kekuasaan. Oleh karena itu, bentuk ruang demokrasi lainnya adalah pemilihan umum. Pemilu menjadi salah satu instrument penting dalam menyampikan aspirasi rakyat dan ide gagasan untuk kebaikan bersama, pemilu juga merupakan arena kontestasi bagi para calon pemimpin dari tingkat nasional maupun tingkat lokal. Pemilihan kepala desa atau yang sering disebut pilkades merupakan tingkatan paling bawah dalam pemilu di Indonesia dan diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomer 63 tahun 2017.

Pilkades merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat desa pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan Pilkades, sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemda sampang no 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat desa.

Harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang kondusif, menjadi harapan bagi warga desa untuk memilih pemimpin yang adil dan bisa membangun desa, dalam prakteknya, pilkades atau pemilihan kelebun sebutan khusus bagi orang Madura yang sudah diatur dalam peraturan daerah sampang no 1 tahun 2015 tentang Pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena permainan elit politik serta faktor-faktor kepentingan politik.

Pilkades adalah suatu proses untuk melegitimasi kekuasaan. Namun, cukup disayangkan ketika kepentingan untuk merebut kekuasaan lebih besar daripada kepentingan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, penyelenggaraan Pilkades juga tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik Pilkades yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan eksistensi masyarakatnya. Konflik ini lahir karena kepentingan untuk merebut kekuasaan diatas segalanya. Sehingga, muncullah pergesekan politik. Hal ini mungkin akan minim terjadi ketika para kandidat yang berkontestasi ini tidak semata-mata hanya melegitimasi kekuasaan yang dimiliki. Tetapi, lebih dari itu yakni memikirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Tak bisa dipungkiri bahwasannya pola kehidupan politik di tiap daerah tidak bisa terlepas dari budaya yang ada di daerah tersebut. Sama seperti halnya di Kabupaten Sampang, dalam pemilihan Kelebun atau Kepala Desa ini cukup familiar dengan budaya carok. Dimana budaya carok bertujuan untuk mempertahankan harga diri masyarakat Madura pada umumnya, termasuk dalam hal pengambil alihan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwasannya carok adalah bagian dari alternatif penyelesaian masalah bagi masyarakat Madura, termasuk masyarakat di wilayah Kab. Sampang.

Sehingga dalam proses pemilihan Kepala Desa apabila diiringi dengan peristiwa carok hal ini menjadi cukup normal bagi mereka. Dalam perjalanannya, budaya carok ini dapat dilihat sebagai budaya kekerasan. Mengapa demikian? Karena dalam budaya carok ini melibatkan beberapa hal terkait kekerasan seperti melibatkan kondisi fisik, emosional, institusional, struktural, verbal atau sikap dan perilaku (Galtung, 1971).

Benak masyarakat awam tentang pulau Madura selalu identik dengan dataran yang tandus, watak penduduk yang kasar bahkan lebih condong ke arogan. Akan tetapi pandangan negatif terhadap etnis madura yang paling terlihat adalah tentang kultur yang menakutkan yaitu carok, bagi masyarakat Madura carok merupakan solusi dari sebuah masalah yang biasanya terjadi, aktifitas ini dilakukan oleh seorang pria yang merasa harga dirinya direndahkan oleh orang lain dengan menggunakan senjata tajam biasanya sabit atau yang lebih dikenal dengan sebutan celurit. Motif atau latar belakang terjadinya carok Sebagian besar disebabkan oleh salah paham, menggaggu istri atau tunangan, harta warisan. Serta juga yang disebabkan oleh hutang dan beberapa factor tertentu. orang madura selalu berpegang teguh pada semboyan "*lebhi bagus pote tulang atembeng pote mata*" yang berarti lebih baik mati daripada malu. Ini menandakan begitu berharganya harga diri untuk masyarakat madura khususnya kaum laki-laki.

Pilkades serentak akan dilakukan di 38 desa yang tersebar di 14 kecamatan pada tahun 2019 di Kabupaten Sampang. ada beberapa daerah yang rawan terjadinya konflik daerah utara atau degeh dan daerah timur atau temor, kecamatan di daerah utara yang rawan akan konflik saat berlangsungnya pemilu adalah kecamatan ketapang tepatnya di desa Bira Barat sedangkan di daerah timur yang paling rawan konflik adalah daerah kecamatan Camplong di desa Tadden. Di desa Bira Barat kecamatan Ketapang kabupaten Sampang sempat akan terjadi kericuhan namun pihak kepolisian telah mewaspadi hal tersebut dengan melakukan razia senjata tajam. Dikutip dari laman jatim.com Polres Sampang bersama Sat Brimob Polda Jatim menyita ratusan senjata tajam (sajam) berbagai jenis dari lokasi pelaksanaan pemilihan kepada desa (pilkades) yang berlangsung Kamis (21/11/2019).

Dalam rangka pilkades serentak tahun 2019 ini banyak sekali ditemukan fenomena carok yang membersamainya. Motifnya tidak lain terjadi karena ada gesekan antar calon. Tidak hanya di Sampang hal tersebut terjadi, tetapi hal ini hampir terjadi diseluruh wilayah di Madura. Carok sebagai tradisi memang telah mengakar kuat dengan masyarakat Madura. Tradisi ini memang terjadi secara turun-temurun untuk menjaga kehormatan. Melihat fenomena tersebut hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Johan Galtung. Teori Galtung tentang budaya kekerasan membagi jenis kekerasan dalam tiga bagian yakni, kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural (Galtung, 1971). Tentunya tradisi carok masuk dalam kategori kekerasan kultural. Kekerasan kultural ini memang bentuknya cukup kompleks. Karena dalam kekerasan kultural bisa mengawinkan antara kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Kasus yang terjadi dalam pilkades di Kabupaten Sampang apabila dilihat dari perspektif Galtung memang cukup kompleks. Dimana dalam kekerasan yang berbasis kultural tersebut juga terdapat kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Bagaimana bisa demikian?

Sweeping itu dilakukan polisi menyusul adanya gesekan diduga akibat ada beberapa warga yang tidak menerima undangan memilih di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Hasil dari beberapa temuan senjata tajam adalah celurit, pisau, dan parang berjumlah 200. Senjata tajam ini di sembunyikan dibalik baju dan di dalam rumah pemilknya. Selain itu polisi juga merazia di desa itu masing-masing di Desa Tadden, Kecamatan Camplong pada hari yang sama.

Bagi orang madura kelembunan atau pemilihan kepala desa bukan hanya tentang kekuasaan, jabatan dan legitimasi akan tetapi menjadi kepala desa merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa. Di dalam kontestasi politik pasti ada kemenangan dan kekalahan. Untuk mencapai hal tersebut ada yang menggunakan cara elegan untuk memprotes atau mengugat hasil suara ataupun melaporkan kecurangan ke Bapilu namun ada juga yang menggunakan cara ekstrem dengan menggerakkan pendukung untuk melakukan protes dengan cara kekerasan.

Penduduk desa yang rata-rata berpendidikan rendah akan lebih menggunakan otot dari pada otak mereka akan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas dan ada beberapa faktor pendukung yang lain seperti dendam keluarga hingga masalah personal. Dalam kerusuhan tidak hanya melibatkan kaum tua akan tetapi kaum muda juga dilibatkan, hingga pada akhirnya kultur carok dalam setiap pilkades sampang akan beregenerasi. Maka dari fakta dan fenomena tersebut penelitian tertarik untuk mengetahui **Eksplorasi Tradisi Carok dalam Pilkades tahun 2019 di kabupaten Sampang.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana berjalanya tradisi carok dalam PILKADES sampang tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi carok terjadi dalam PILKADES Sampang tahun 2019
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam pemerintahan desa

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memperkuat studi politik lokal khususnya dalam pilkada Sampang tahun 2019.
2. Memperoleh pengetahuan tentang kuatnya tradisi carok dalam kontestasi PILKADES di kabupaten Sampang tahun 2019.

1.5Konseptualisasi

1.5.1 Konsep Konflik

Konflik merupakan sebuah gejala sosial yang kerap ditemukan dalam berbagai lapisan masyarakat di setiap kurun waktu. Konflik tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat sebab konflik merupakan suatu produk dari hubungan sosial. Masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, selalu saja terjadi

konflik antara warga-warga masyarakat yang terlibat di dalam hubungan sosial. Konflik dapat dimaknai sebagai suatu pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling sedikit dua orang atau lebih dan antar kelompok. Beberapa kelompok serta individu memiliki keyakinan serta harapan untuk dapat menang dalam kontestasi politik namun ekspektasi bisa tidak sesuai dengan realita yang ada, berakibat pada deprivasi relatif, Gurr mendefinisikan deprivasi relatif sebagai persepsi individu atas jarak negatif antara nilai ekspektasi (*value expectations*) dan nilai kapabilitas (*value capabilities*). Nilai ekspektasi adalah harapan individu akan kualitas hidup tertentu yang dipercaya dirinya berhak untuk memiliki atau menikmatinya. Nilai kapabilitas adalah suatu kondisi di mana mereka percaya mampu untuk mencapai harapan tersebut (Gurr, 1971) faktor-faktor ini yang menyebabkan terjadinya konflik.

Menurut Gurr dalam Rauf Maswadi, konflik mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah hubungan sosial tersebut dapat disebut sebagai konflik Pertama, ada dua atau lebih pihak yang terlibat. Kedua, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi. Ketiga, mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya. Keempat, adalah interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang independen.

1.5.2 Konsep Kekerasan

Kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, sehingga kekerasan dapat diidentifikasi menjadi: (1) kekerasan terbuka: (2) kekerasan tertutup, misalkan mengancam: (3) kekerasan agresif, misalkan untuk mendapatkan sesuatu: (4) kekerasan defensif Douglas dan Waksler (dalam Santoso, 2002, 11) . Menurut Gurr, 1971 kekerasan politik yaitu akibat terjadinya kesenjangan relatif. Terdapat tiga macam kategori kekerasan pada satu wilayah ataupun bangsa berdasarkan magnitude atau daya rusaknya, yaitu:

- (A). Kerusuhan, ciri spontan, tidak terorganisir dengan tingkat partisipasi populer cukup besar, termasuk mogok berujung kekerasan, kerusuhan, politik, dan pemberontakan lokal,
- (B). Konspirasi, ciri-ciri kekerasan politik terorganisasi secara baik dengan partisipasi terbatas, terorisme skala kecil, perang gerilya skala kecil, kudeta, dan pembangkangan militer,
- (C). Perang internal, ciri kekerasan politik terorganisir rapih dengan partisipasi luas, di desain untuk menjatuhkan rezim atau menghancurkan negara dan disertai dengan kekerasan meluas, termasuk terorisme skala besar dan perang gerilya, dan revolusi.

Kekerasan dapat terjadi sebagai akibat terciptanya deprivasi relatif, yakni terdapatnya kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu yang diperoleh . Semakin lebar jarak kesenjangan antara ekspektasi dengan apaapa yang diperoleh akan semakin besar pula peluangterjadinya konflik dan kekerasan (Surwandono, 2009)

1.5.3 Konsep Carok

Terdapat lima unsur dalam carok, yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antar laki-laki, pelecehan harga diri terutama berkaitan dengan kehormatan perempuan (istri), perasaan malu (malo), adanya dorongan, dukungan, persetujuan sosial disertai perasaan puas, dan perasaan bangga bagi pemenangnya (Latife, 2002) . Carok sebagai pembelaan terhadap harga diri yang terlecehkan dan dipandang oleh sebagian pelakunya sebagai suatu alat untuk memperoleh kekuasaan. Terjadinya carok tergantung dari pengaruh timbal balik antara alasan, konteks, situasi setempat, waktu, dan sifat-sifat orang yang terlibat.

Carok merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik pada masyarakat Madura, munculnya tradisi carok ini dikarenakan tidak dapat ditemukan jalan keluar secara damai sehingga harus dengan kekerasan. Carok merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik yang berbenturan dengan aturan Hukum Negara di Indonesia. Carok merupakan pengadilan dimana petarung yaitu pihak laki – laki merupakan para pihak yang memperjuangkan keadilan dan carok

sebagai pengadilan memberikan keadilan itu. Carok dianggap lebih memenuhi rasa keadilan mereka. Hal yang memengaruhi tradisi carok di Madura ini antara lain adalah faktor ekonomi dan politik. Pemerintah masih belum bisa meredam konflik dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam aspek keadilan (Handayani, 2019).

1.5.4 Konsep Pemilu

Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis *Schumpetrian*, pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi *kontestasi* antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak –hak sipil dan politik warga negara . Demokrasi juga mengartikan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme check and balances terhadap partai yang berkuasa *ruling party* (Robert, 1971).

Menurut Arghiros (2001) nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Dengan cara itu, masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik.

Pemilihan umum sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih kandidat pemimpin secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah pemilihan presiden dan pemilihan kepala desa) dan pelebagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.

1.5.5 Konsep Masyarakat / Warga Desa

Menurut Rahardjo desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha- usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial. Definisi Desa tersebut yang ditandai adanya cara hidup seperti pertanian, menandakan bahwa kehidupan manusianya sudah menetap, mempunyai tanah untuk mengusahakan pertanian bahan makanan. Kehidupan dengan mengerjakan sawah ataupun ladang orang dapat membuat mereka memungut hasil dari tempat dimana mereka tinggal.

kehidupan yang telah menetap seperti inilah yang kemudian menimbulkan masyarakat Desa. Dalam masyarakat Desa, suburnya tanah dan luas serta longgarnya daerah yang dapat dipekerjakan sangat mempengaruhi persekutuan manusia yang menetap disitu (Desa). Jadi dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses lahirnya suatu masyarakat Desa diawali dengan hubungan antara individu-individu dan juga ikatan yang didasarkan oleh kesamaan tempat tinggal. Masyarakat pedesaan atau Desa dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dan sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka (Rahardjo, 1999).

1.5.6 Konsep Eksploitasi Tradisi

Menurut KBBI eksploitasi adalah pendaya-gunaan, pemanfaatan atau pengusahaan demi keuntungan diri sendiri. Dalam hal ini eksploitasi juga termasuk tindakan memanfaatkan orang lain dengan cara tidak terpuji. Sehingga, dapat dikatakan bahwa eksploitasi adalah usaha untuk memanfaatkan individu atau objek

tertentu demi mendapatkan keuntungan pribadi semaksimal mungkin. Sedangkan tradisi adalah suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat, yang dilakukan secara berulang-ulang dan akhirnya menjadi turun temurun. Sehingga menjadikan suatu kebiasaan. Tradisi juga disebut sebagai adat istiadat. Namun, kecenderungan penggunaan kata adat lazim digunakan untuk membedakan yang mana mendapat sanksi atau yang mana yang tidak dikenai sanksi (Ensiklopedia, 1999).

Tradisi juga mengatur kehidupan antar manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam. Sehingga tradisi ini membentuk suatu sistem pola hidup masyarakat yang juga mengatur sanksi, norma, pelanggaran ataupun penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya eksploitasi tradisi adalah suatu tindakan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan memanfaatkan tradisi yang ada dalam masyarakat guna untuk memberikan ketakutan atau tekanan di dalam masyarakat.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Teori Kekerasan Johan Galtung

Teori yang dikemukakan oleh Johan Galtung adalah teori budaya kekerasan. Pada dasarnya kekerasan dapat masuk kedalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya adalah untuk melegitimasi kekerasan secara struktural (Galtung, 1990). Pada dasarnya teori budaya kekerasan yang dicetuskan oleh Galtung (1990) memang berbasis pada kekerasan struktural. Teori ini mencoba untuk mengelaborasi analisis berorientasi aktor dan analisis berorientasi struktur.

Bagi Galtung (1990) kekerasan terjadi karena adanya pengaruh yang begitu besar pada jasmani dan aktualnya. Sehingga tindakan yang dilakukan dibawah ranah potensialnya. Disini kekerasan dapat dilihat sebagai perbedaan antara yang aktual dan yang potensial. Artinya, problem kekerasan disini dilihat sebagai ranah potensi yang masih ada di dalam alam bawah sadar, sedangkan ranah aktual adalah ranah yang menuntut untuk direalisasikan. Dalam definisi Galtung tidak dibedakan antara *violence acts* atau tindakan keras, sifat keras dengan *act of violence* atau

tindakan kekerasan. Karena kekerasan dalam definisi Galtung setidaknya memuat 6 dimensi yakni (Windhu, 1992):

1. Kekerasan fisis dan psikologis. Kekerasan fisis dilakukan untuk menyakiti tubuh manusia. Sedangkan kekerasan psikologis menyerang kemampuan mental dan otak.
2. Pengaruh positif dan negatif. Disini mencoba untuk memberikan reward. Meskipun terdapat euphoria, tetapi euphoria yang dirasakan hanya sesaat karena sifatnya yang manipulatif. Sebenarnya disini terdapat sistem pengendalian yang halus.
3. Terdapat objek atau tidak. Ancaman fisis atau psikologis akan selalu ada dalam kekerasan. Yang perlu dipahami adalah bahwa tindakan yang dilakukan meskipun tidak memakan korban, tetapi akan selalu ada kemungkinan untuk membatasi tindakan.
4. Ada subjek atau tidak. Kekerasan dapat disebut sebagai kekerasan langsung apabila dilakukan secara personal. Dalam kasus ini pelaku dapat ditemukan. Sedangkan kekerasan tidak langsung biasa terjadi secara struktural. Karena pada kekerasan tersebut tidak dapat ditemukan pelakunya. Dalam hal ini biasanya memunculkan kesempatan hidup yang berbeda.
5. Disengaja atau tidak. Dimensi ini sebenarnya cukup komprehensif dalam melihat kekerasan, karena kekerasan tidak semuanya dilakukan dengan kesengajaan. Beberapa diantaranya dilakukan dalam ketidaksengajaan dalam struktur. Sejatinya baik itu sengaja atau tidak kekerasan tetap dianggap sebagai kekerasan.
6. Yang tampak dan tersembunyi. Perbedaan kekerasan yang tampak dan tersembunyi ialah jika kekerasan tampak dapat dilihat secara langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi

tidak tampak nyata, tetapi ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa kapan saja meledak. Kekerasan tersembunyi bisa muncul karena ketidakstabilan situasi. Kekerasan tersembunyi juga bisa muncul ketika dalam suatu masyarakat terdapat kelompok egaliter yang mudah sekali digiring menjadi kelompok feodal.

Kekerasan juga dibedakan menjadi kekerasan personal atau kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan personal sifatnya dinamis, fluktuatif dan bisa terjadi perubahan secara signifikan. Sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, stabil dan tidak tampak (Galtung, 1990). Pada kekerasan personal dapat dilihat melalui 3 pendekatan, pertama cara yang digunakan (menggunakan senjata atau tubuh manusia), kedua bentuk organisasi (individu, pasukan atau massa), dan ketiga sasaran (Windhu, 1992). Sedangkan kekerasan struktural mengakibatkan terjadinya kesenjangan ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ini dipengaruhi oleh 6 faktor seperti, kedudukan linier, pola interaksi, keselarasan kedudukan, korelasi kedudukan dan sentralitas, persesuaian antar sistem, dan perangkapan yang tinggi antar tingkat. Antara kekerasan personal dan kekerasan struktural pada dasarnya perbedaannya tidak terlalu tajam. Antara satu sama lain saling berhubungan dan berkelindan.

Sedangkan kekerasan kultural adalah kekerasan yang melegitimasi adanya bentuk kekerasan langsung dan kekerasan struktural dalam bentuk budaya (Galtung, 1990). Kekerasan kultural menurut Galtung adalah sikap yang telah diajarkan kepada kita sejak kecil yang kemudian menjadi kebiasaan karena berada pada kehidupan sehari-hari terkait kekuasaan dan penggunaan kekerasan untuk kepentingan kekuasaan (Galtung, 1971).

1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau teknik untuk mengetahui tujuan penelitian itu sendiri. Metodologi juga merupakan perwujudan dari sikap epistemik dan metode penelitian (Aminah dan Roikan, 2019). Sedangkan Tuchman dalam Aminah dan Roikan (2019) menjelaskan bahwasannya metode penelitian ialah suatu prosedur ilmiah yang di dalamnya juga terdapat pembentukan konsep,

preposisi, model, serta teori.

1.7.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana tradisi carok yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang begitu kuat pengaruhnya di segala lini kehidupan. Termasuk dalam hal ini yakni kehidupan berpolitik. Dimana pada pilkada serentak tahun 2019 di Kabupaten Sampang, beberapa wilayah di Kabupaten Sampang pilkades serentak ini diiringi dengan adanya tradisi carok. Disini penulis ingin melihat bagaimana proses tradisi carok berlangsung dalam pilkades 2019. Serta bagaimana dampak tradisi carok pada pilkades serentak tahun 2019.

1.7.2 Tipe Penelitian

Topik tradisi carok dalam pilkades merupakan penelitian politik. Penelitian politik itu sendiri ialah penelitian yang memiliki tujuan untuk merumuskan permasalahan politik serta menemukan ataupun memberikan tafsir terhadap pengetahuan politik baru (Aminah dan Roikan, 2019). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendapat Lisa Harison mengemukakan bahwasannya penelitian kualitatif adalah melakukan analisis sikap politis dan perilaku yang tidak dapat diubah menjadi kuantitatif (Harison, 2017). Kemudian, metode kualitatif adalah metode yang keterkaitannya sangat erat dengan manusia (McMillan & Schummacer, 1997). Pendapat dari ilmuan lain tentang metode kualitatif antara lain sebagai prosedur penelitian yang menjelaskan fenomena secara lisan (Moelong, 2007). Hal yang sering kita temui pada penelitian kualitatif adalah mencoba untuk menangkap berbagai fenomena unik (Sukidin, 2002).

Pada penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan generalisasi. Hal ini karena penelitian kualitatif mengandaikan bahwa setiap fenomena adalah unik. Oleh karena itu, setiap temuan fenomena harus dilihat secara spesifik, tidak dapat dengan mudah untuk menggeneralisasinya. Untuk memperkuat temuan data yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif yakni dibutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari informan. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara mendalam atau melakukan pengamatan

secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui dokumen yang bisa untuk menunjang data primer (Siyoto & Ali Sadikin, 2015). Sehingga keberadaan data primer dan data sekunder ini bisa saling melengkapi.

Sedangkan format deskriptif adalah metode menggambarkan dan menjelaskan berbagai kondisi serta situasi dilapangan. Kemudian, kemunculan berbagai macam variabel yang ada pada objek penelitian diharapkan dapat memperkaya temuan data. Penggunaan metode kualitatif dengan format deskriptif ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Selain itu yang juga penting adalah metode ini memberikan pedoman dalam pencarian data, pengolahan data serta analisis data.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian tentu dilakukan dengan berbagai indikator tertentu. Indikator ini ditentukan berdasarkan kebutuhan peneliti dalam mencari informasi. Sesuai dengan topik penelitian eksploitasi tradisi carok dalam pilkades di Kab. Sampang maka, informan yang dapat memenuhi indikator adalah mereka yang terlibat pada pilkades diantaranya seperti, calon kandidat kepala desa, struktur desa, tim sukses, blater dan para pendukung kandidat. Untuk menentukan subjek penelitian ini tentu peneliti harus memahami siapa saja pihak yang berkonflik.

Tujuan pemetaan agar subjek penelitian mendapatkan akurasi yang cukup baik. Menjadi hal yang sangat lumrah apabila selama melakukan penelitian terdapat informan lain yang tidak direncanakan sebelumnya atau biasa kita sebut dengan *snowball sampling*. Pun juga wajar ketika pada saat melakukan penelitian terdapat informan yang merekomendasikan informan baru saat proses wawancara. Oleh karena itu kebutuhan informan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh informasi (Horison, 2017).

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara terhadap dua narasumber. Narasumber yang pertama memiliki background sebagai orang lokal kuat di wilayahnya. Alasan penulis menyasar orang lokal kuat karena dari perspektif penulis orang lokal kuat menjadi salah satu subjek penelitian yang dapat

menjelaskan kondisi senyatanya yang ada dilapangan seperti apa. Narasumber kedua yakni narasumber yang memiliki background sebagai kepala desa. Dari hemat penulis pemilihan subjek penelitian yang kedua ini karena bagi penulis nantinya penulis akan mendapatkan informasi terkait dinamika pemilihan kepala desa dengan lebih rinci karena narasumber adalah pelaku sejarah.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Secara umum dalam teknik pengumpulan data setidaknya terdapat tiga teknik yakni *in depth interview*, observasi dan dokumentasi. Berikut penjelasannya:

1. *In Depth Interview*

In depth interview Atau kita bisa menyebut wawancara mendalam adalah metode pencarian informasi dengan melakukan komunikasi langsung pada informan. Dalam pencarian informasi ini peneliti bisa memperoleh informasi secara mendalam baik dari pendapat, pengalaman atau pengetahuannya terkait topik yang sedang peneliti bahas. Ketika melakukan wawancara mendalam hal yang penting untuk diingat adalah kesediaan informan dalam memberikan informasi. Kemudian, dalam pelaksanaannya juga dibutuhkan pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini untuk melihat hasil wawancara sesuai dengan validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

Dalam proses melakukan wawancara mendalam, penulis menemukan beberapa hal terkait kondisi dilapangan. Bahwasannya dilapangan carok masih menjadi alternatif penyelesaian masalah. Meskipun saat ini penggunaannya semakin berkurang. Namun, masyarakat Kab. Sampang masih percaya bahwa untuk mempertahankan harga diri perlu untuk melakukan carok. Saat ini, masyarakat Kab. Sampang lebih tertib ketika proses pemilu berlangsung. Hal ini akibat dari upaya kepolisian dalam melakukan *sweeping* untuk

mengamankan situasi. Sehingga, keberadaan carok dalam pemilu dapat diminimalisir. Tentunya masih belum bisa dihilangkan sepenuhnya.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitiannya. Sehingga, peneliti bisa memperoleh data yang akurat. Karena pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan seluruh panca indera untuk menemukan fakta dilapangan. Dengan observasi, peneliti memiliki peluang besar untuk mengetahui tindakan, perilaku, kegiatan, interaksi interpersonal serta proses penataan dari proses pengalaman manusia (Horison, 2017). Observasi secara langsung dilakukan oleh peneliti dengan mengamati bagaimana proses tradisi carok ini mewarnai pilkades di desa yang ada di Kab. Sampang. Meskipun rentan waktu terjadinya pelaksanaan pilkades ini telah lewat, tetapi penulis masih bisa melakukan pengamatan dari dokumen atau kondisi sosial masyarakat di desa setelah selesainya proses pilkades.

Dalam melakukan observasi secara langsung peneliti melakukan kategorisasi subjek penelitian. Diantaranya peneliti melakukan observasi kepada pihak kepolisian, tokoh masyarakat, camat, dan warga. Kategorisasi ini dilakukan agar supaya peneliti mendapatkan informasi secara detail terkait informasi yang dibutuhkan. Informasi yang detail bisa di dapatkan dengan melakukan kategorisasi informasi. Hal tersebut akan membantu penulis untuk lebih mengerucutkan topik pembahasan penelitian ini. Berikut penulis tampilkan kategorisasi informasi yang di dapat oleh penulis:

No.	Subjek Peneliti	Tujuan

1	Kepolisian	<i>Untuk mengetahui proses penertiban masyarakat saat pemilu berlangsung. Sehingga dapat meminimalisir adanya carok ketika pilkades</i>
2	Camat	<i>Untuk mendapatkan informasi terjadinya carok di daerah tersebut</i>
3	Tokoh Masyarakat	<i>Untuk mengetahui bagaimana berjalannya proses pilkades</i>
4	Warga	<i>Untuk mengetahui bagaimana respon warga terhadap fenomena carok saat pilkades berlangsung</i>

3. Dokumentasi

Adalah proses interpretasi atau proses penelaahan dokumentasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis demi menunjang suatu fakta. Data ini bisa kita peroleh melalui foto, kutipan, korespondensi, laporan, catatan dan lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan validitasnya.

1.7.5 Teknik Analisa Data

Penelitian ini setidaknya melakukan tiga tahapan analisis data. Tentunya, sebelum pada tahap analisis data peneliti melakukan pengumpulan data primer dan sekunder hasil dari melakukan wawancara dengan informan, observasi ataupun dokumentasi. Dari data yang ada kemudian dapat dilakukan komparasi atau elaborasi data.

Untuk itu yang pertama kali dilakukan penulis adalah reduksi data. Reduksi data disini adalah proses penyederhanaan data. Penyederhanaan data ini dalam artian semua data yang telah di dapat dapat dipilih dan dibuang yang sesuai kebutuhan atau tidak. Sehingga, penyederhaan data ini sebagai bentuk efektivitas peneliti dalam melakukan olah data. Penyederhanaan ini dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi terkait rangkuman atau intisari dari data yang telah diperoleh.

Kedua, penyajian data hasil reduksi dalam satu kesatuan untuk mempermudah analisis. Ketiga, verifikasi data untuk menyimpulkan makna.